



## **The Importance of Economic Valuation of Natural Resources as a Basis for Decision-Making to Support Sustainable Development**

**Bonaraja Purba<sup>1</sup>, Aisyah Rahmadani<sup>2</sup>, Najwa Aulia Nasution<sup>3</sup>**

<sup>1, 2, 3</sup> Universitas Negeri Medan

Email: <sup>1</sup> [bonarajapurba@unimed.ac.id](mailto:bonarajapurba@unimed.ac.id), <sup>2</sup> [aisyah.7252540011@mhs.unimed.ac.id](mailto:aisyah.7252540011@mhs.unimed.ac.id),

<sup>3</sup> [najwa.7253240033@mhs.unimed.ac.id](mailto:najwa.7253240033@mhs.unimed.ac.id)

### **ABSTRACT**

Natural resources (SDA) are a wealth provided by nature and play a vital role in human life. However, the value of natural resources is often not fully considered in decision-making. As a result, many development decisions focus solely on short-term profits without considering the long-term. However, if properly calculated, the economic value of lost natural resources can far outweigh the project's profits. The data in this journal shows that development in Indonesia has been quite good in terms of economic and human welfare, but it has not kept pace with environmental conditions, which are often neglected. By calculating the economic value of natural resources from the planning stage, development decisions can be more equitable and balanced, so that economic progress no longer has to sacrifice the environment for current and future generations.

**Keywords: economic valuation, natural resources, decision-making, and sustainable development.**

### **PENDAHULUAN**

Sumber Daya Alam (SDA) merupakan kekayaan yang diberikan oleh alam dan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Warisan alam ini tidak hanya mencakup benda hidup seperti tumbuhan dan hewan saja, tetapi juga benda tidak hidup seperti air, tanah, dan mineral. Pemanfaatan SDA yang bijak menjadi isu penting yang harus ditangani karena merupakan salah satu penggerak roda perekonomian suatu negara.

Namun, tidak semua sumber daya alam memiliki harga pasar dan dapat diperjualbelikan. Ketidakmampuan mekanisme pasar dalam menetapkan harga pada jasa lingkungan menyebabkan timbulnya fenomena kegagalan pasar. Aspek-aspek lingkungan sering tidak diperhitungkan yang dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan. Oleh karena itu, valuasi ekonomi sumber daya alam hadir untuk melihat nilai-nilai yang tidak memiliki harga pasar agar dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Valuasi ekonomi bukanlah upaya untuk mengkomodifikasi alam demi kepentingan komersial semata, melainkan juga cara untuk melihat nilai-nilai yang tidak memiliki harga pasar, sehingga dapat membandingkan secara adil antara keuntungan atau kerugian suatu sumber daya alam dalam jangka pendek serta jangka panjangnya.

Penerapan valuasi ekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan merupakan syarat penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan pembangunan berkelanjutan mengharuskan terciptanya keseimbangan antara aktivitas ekonomi, sistem biofisik, dan kualitas dari masyarakat sosial. Tanpa adanya valuasi ekonomi yang tepat, kebijakan pembangunan berisiko mengabaikan keberlanjutan dan justru mempercepat degradasi lingkungan.

Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara valuasi ekonomi sumber daya alam dengan pembangunan berkelanjutan. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang adil bagi generasi sekarang dan generasi di masa depan.

Valuasi ekonomi sumber daya alam adalah cara untuk mengukur besar nilai ekonomi dari kekayaan alam dan lingkungan. Valuasi ekonomi terhadap sumber daya alam memiliki tujuan agar manusia lebih menghargai keberadaan dan pengaruhnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, hadirilah Nilai Ekonomi Total/Total Economic Value (TEV).

Nilai Ekonomi Total adalah nilai-nilai ekonomi yang terkandung dalam suatu sumber daya baik nilai guna maupun nilai fungsional yang harus diperhitungkan dalam menyusun kebijakan pengelolaannya sehingga alokasi dan alternatif penggunaannya dapat ditentukan secara benar dan mengenai sasaran. Konsep Nilai Ekonomi Total muncul karena harga pasar tidak selalu mencerminkan seluruh nilai SDA. Nilai Ekonomi Total terbagi menjadi beberapa komponen, yaitu:

1. UV= Use Values (Nilai Manfaat) Use Values adalah suatu cara penilaian atau upaya kuantifikasi dan jasa sumber daya alam dan lingkungan ke nilai uang (monetize), terlepas ada atau tidaknya nilai pasar terhadap barang dan jasa tersebut.
  - DUV= Direct Use Value (Nilai Kegunaan Langsung) Direct Use Value adalah barang dan jasa yang terkandung dalam suatu sumber daya yang secara langsung dapat dimanfaatkan.
  - IUV= Indirect Use Value (Nilai Kegunaan Tidak Langsung) Indirect Use Value yaitu barang dan jasa yang ada karena keberadaan suatu sumber daya yang tidak secara langsung dapat diambil dari sumber daya alam tersebut. Masyarakat mungkin tidak mengambil sesuatu langsung dari hutan, tetapi mereka tetap mendapatkan manfaat dari fungsi ekologis hutan.
  - OV= Option Value (Nilai Pilihan) Option Value ini biasanya diinterpretasikan sebagai nilai keanekaragaman dari suatu ekosistem. Artinya seseorang memberikan nilai terhadap SDA karena ingin mempertahankan kemungkinan untuk menggunakannya di masa depan.
2. NUV= Non-Use Value (Nilai Bukan Manfaat) Non-Use Value adalah nilai yang diperoleh dari suatu sumber daya yang bukan dari pemanfaatan terhadap sumber daya tersebut.
  - EV= Existence Value (Nilai Keberadaan) Existence Value adalah nilai keberadaan suatu sumber daya alam yang terlepas dari manfaat yang dapat diambil. Nilai ini lebih berkaitan dengan nilai religius yang melihat adanya hak hidup pada setiap komponen sumber daya alam.
  - BV= Bequest Value (Nilai Warisan) Bequest Value adalah nilai yang berkaitan dengan perlindungan atau pengawetan suatu sumber daya agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang sehingga mereka dapat mengambil manfaat yang telah diambil oleh generasi sebelumnya.

#### **Rumus Nilai Ekonomi Total: $TEV = UV \text{ (Use Value)} + NUV \text{ (Non-Use Value)}$**

Konsep Total Economic Value telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian mengenai valuasi sumber daya alam di Indonesia. Salah satu penelitian yang menerapkan konsep valuasi ekonomi ini dilakukan oleh (Mayangsari, dkk., 2021) yang meneliti nilai ekonomi ekosistem mangrove di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Penelitian ini menunjukkan adanya kerusakan pada mangrove akibat abrasi dan alih fungsi lahan menjadi tambak.

Dengan menggunakan pendekatan Total Economic Value, penelitian ini menghitung dua komponen utama, yaitu nilai guna (use value) dan nilai bukan guna (non use value). Hasil penelitian menunjukkan bahwa total nilai ekonomi ekosistem mangrove di Desa Timbulsloko mencapai 12.703.693.939 per tahun, dengan nilai guna langsung sebagai penyumbang terbesar

yaitu 60, 56%, nilai guna tidak langsung 26,66%, nilai keberadaan 6,60%, nilai warisan 6,06%, dan nilai pilihan 0,12%.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ekosistem mangrove sudah rusak akibat abrasi, upaya rehabilitasi tetap dapat menghasilkan ekonomi yang besar, sekaligus membuktikan bahwa manfaat mangrove tidak hanya berasal dari hasil tangkapan yang dijual di pasar, tetapi juga dari fungsi ekologisnya yang sering diabaikan dalam valuasi ekonomi sumber daya alam.

## METODE PENELITIAN

Jurnal ini menggunakan metode study literature (library research), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik yang dibahas, tanpa melakukan terjun langsung ke lapangan untuk mencari datanya. Sumber yang digunakan diprioritaskan pada publikasi lima tahun terakhir agar informasi yang disampaikan tetap relevan dan terkini. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan merangkum konsep valuasi ekonomi sumber daya alam serta perannya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berdasarkan teori dan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara membaca, memahami, dan membandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lainnya untuk mendapatkan kesimpulan dan gambaran yang utuh mengenai topik yang dibahas. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pentingnya valuasi ekonomi sumber daya alam sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, berdasarkan dari berbagai sumber yang telah ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan berkelanjutan tidak bisa dinilai dari satu setkor saja, karena pembangunan berkelanjutan menyangkut sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan sekaligus. Tabel berikut merangkum data dari beberapa sektor untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi Indonesia saat ini.

**Tabel 1. Gambaran Umum dari Beberapa Sektor di Indonesia**

| Indikator                                | Capaian Kinerja                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks SDGs                              | Indonesia peringkat ke-77 dunia dengan skor 75,02 pada 2024                                                                                                                                  |
| Kesejahteraan Indeks Pembangunan Manusia | 75,02 pada 2024 atau meningkat sebesar 0,85%                                                                                                                                                 |
| Kemiskinan                               | Pada Maret 2026 sebesar 8,07%, menurun 0,18% terhadap September 2025 dan menurun 0,40% terhadap Maret 2025                                                                                   |
| Ekonomi                                  | Perekonomian Indonesia tumbuh 5,29% secara tahunan pada kuartal II-2026                                                                                                                      |
| Energi Terbarukan                        | bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 15,75%, sementara target nasional yaitu 23%.                                                                                                     |
| Hutan                                    | lahan berhutan di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 95,5 juta hektare, atau 51,1% dari total daratan. Sementara itu, angka deforestasi netto tahun 2024 tercatat sebesar 175,4 ribu hektar. |

Dari tabel diatas, terlihat kesejahteraan indeks pembangunan manusia dan ekonomi memiliki capaian yang cukup baik. Indeks pembangunan manusia sudah termasuk ke dalam kategori tinggi, kemiskinan menurun di bawah 9% dan ekonomi tumbuh diatas 5%. Namun,

skor SDGs Indonesia baru sekitar 70-an dari 100, energi terbarukan masih jauh dari target 23%, dan hutan yang masih sering di desforestasikan setiap tahunnya. Artinya, kemajuan sosial dan ekonomi berjalan bersamaan dengan tekanan pada alam yang masih belum berhasil dikendalikan.

Kementerian Kehutanan pada tahun 2025 mencatat desforestasi netto 2024 sebesar 175,4 ribu hektar. Angka ini diperoleh dari deforestasi bruto sebesar 216,2 ribu hektare dikurangi hasil reforestasi yang mencapai 40,8 ribu hektare. Mayoritas deforestasi bruto terjadi di hutan sekunder dengan luas 200,6 ribu hektare (92,8%), di mana 69,3% terjadi di dalam kawasan hutan dan sisanya di luar kawasan hutan. Sementara itu, Auriga Nusantara melaporkan penggundulan hutan tahun 2024 mencapai 261.575 hektare pada tahun yang sama.

Selisih ini kemungkinan dipengaruhi perbedaan pendekatan dan metode hitung, dan menunjukkan bahwa alam sering sekali masih sulit diukur, apalagi dinilai secara ekonomi. Indikator seperti pertumbuhan ekonomi biasanya mencatat kayu yang dijual atau lahan yang dibangun tetapi tidak mencatat fungsi alam yang hilang, misalnya penahan abrasi atau penyerap karbon.

Valuasi ekonomi mengisi celah tersebut dengan memberi angka pada manfaat alam yang tidak memiliki harga pasar. Contohnya penelitian Mayasari dkk. (2021) di Desa Timbulsloko, Demak. Dengan pendekatan Total Economic Value, nilai ekosistem mangrove seluas 77,04 hektare di sana mencapai Rp12,7 miliar per tahun, atau sekitar Rp164,9 juta per hektare per tahun. Nilai guna langsung (hasil tambak, tangkapan ikan, bibit mangrove) hanya 60,56 persen, sedangkan sisanya berasal dari nilai guna tidak langsung sebagai pelindung pantai (26,66 persen), nilai keberadaan (6,60 persen), nilai warisan (6,06 persen), dan nilai pilihan (0,12 persen).

Lebih dari sepertiga nilai total, dengan kata lain, adalah manfaat yang tidak pernah muncul di pasar. Hal yang perlu dicatat yaitu angka Timbulsloko bersifat khusus lokasi. Nilai perlindungan pantainya dihitung dari biaya bangunan pantai pengganti, dan ekosistemnya adalah hasil rehabilitasi, sehingga tidak bisa langsung dikalikan ke daerah lain. Contoh ini adalah menunjukkan bahwa sebelum mengubah mangrove menjadi tambak atau kawasan lain, nilai yang hilang harus ikut dibandingkan dengan keuntungan proyek.

Dasar hukumnya sebenarnya sudah ada. Permen LH Nomor 7 Tahun 2014 menyebut valuasi ekonomi lingkungan hidup sebagai salah satu cara menghitung kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan. Namun aturan ini bekerja setelah kerusakan terjadi. Gagasan yang diusulkan tulisan ini adalah menggeser pemakaiannya ke tahap perencanaan, misalnya dalam analisis biaya manfaat proyek, AMDAL, dan penyusunan tata ruang, agar kerugian dihitung sebelum keputusan diambil.

Namun, penerapannya tidak mudah. Pertama, penelitian valuasi masih terbatas pada lokasi dan sumber daya tertentu, sehingga banyak daerah belum punya angka. Kedua, nilai antarpelitian sulit dibandingkan karena luas area, metode, dan komponen yang dihitung berbeda (Mayasari dkk., 2021). Ketiga, pemerintah daerah menghadapi kegoyahan untuk lebih mengutamakan mengejar pendapatan jangka pendek dibanding manfaat lingkungan yang baru terasa kemudian. Data di atas memperlihatkan bahwa Indonesia sudah cukup berhasil pada sisi sosial dan ekonomi, tetapi belum pada sisi lingkungan dan energi. Dengan adanya valuasi ekonomi, pembangunan berkelanjutan berjalan dengan memastikan nilai alam ikut dihitung juga dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan begitu, target SDGs 2030 tidak dikejar dengan mengorbankan aspek lingkungan yang menopang pembangunan jangka panjang.

## KESIMPULAN

Dari yang sudah dibahas, kita sebagai manusia yang selalu membutuhkan alam harus menjaga kelestariannya agar tidak hilang, serta mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan. Alam selalu memperbolehkan kita untuk mengambil bagiannya, tapi sering sekali

nilainya diabaikan karena tidak memiliki harga pasar. Padahal fungsi alam yang tidak terlihat justru bisa lebih besar dari yang dibayangkan. Oleh karena itu, valuasi ekonomi sebaiknya bukan hanya menjadi alat hitung kerusakan yang telah terjadi, tapi digunakan sejak awal perencanaan. Dengan cara ini, pembangunan tidak lagi harus memilih antara ingin maju secara ekonomi atau menjaga alam agar tidak rusak, karena keduanya bisa berjalan bersama jika nilai alam benar-benar diperhitungkan sejak awal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, O. S. (2016). *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Di Persimpangan Jalan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Asbaruna, L. &. (2025). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Banten: SADA KURNIA PUSTAKA.
- Anderson, J. E. M. I., Pratama, Y., & Jaryanti, A. (2026). KAJIAN VALUASI EKONOMI EKOWISATA SEBAGAI PENDEKATAN DALAM Mendukung PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 3(04 April), 1633-1640.
- Ahdiat, A. (2025, 29 September). *Indeks SDG Indonesia peringkat ke-77 global*. Databoks.<https://databoks.katadata.co.id/ekonomimakro/statistik/68da24ac78d9c/index-sdg-indonesia-peringkat-ke-77-global>
- Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Agustus). *Persentase penduduk miskin Maret 2026 turun menjadi 8,07% persen*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/2594/persentase-penduduk-miskin-maret-2026-turun-menjadi-8-07-persen-.html>
- BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu. (2024, 18 November). *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2024 meningkat*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu. <https://okukab.bps.go.id/en/news/2024/11/18/710/index-pembangunan-manusia-indonesia-2024-meningkat.html>
- Dorimulu, P. (2026, 5 Agustus). *Ekonomi tumbuh 5,29%, angka pengangguran & kemiskinan turun, tapi ketimpangan membesar*. *Investortrust.id*. <https://investortrust.id/macro/111924/ekonomi-tumbuh-5-29-angka-pengangguran-kemiskinan-turun-tapi-ketimpangan-membesar>
- Fadhli, A. N., & Maulana, S. (2025). Analisis Integratif Valuasi Ekonomi Lingkungan Pada Hutan, Laut, Dan Kota Yang Berkelanjutan. *Journal of Accounting, Economics, and Business Education*, 340-346.
- Hutabarat, A., Lumbanbatu, S., Sigiro, Y., & Purba, B. (2025). Pentingnya valuasi ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(2), 1-10.
- Kementerian Kehutanan. (2025, 21 Maret). *Hutan dan deforestasi Indonesia tahun 2024* (Siaran Pers Nomor: SP. 031/HKLN/PPIP/HMS.3/03/2025). <https://www.kehutan.go.id/pers/article-10>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2026, 9 Januari). *Bauran EBT di sektor listrik lampau target RUKN*. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bauran-ebt-di-sektor-listrik-lampau-target-rukn>
- Kementerian Lingkungan Hidup. (2014). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup*. JDIH Badan Pemeriksa Keuangan.<https://peraturan.bpk.go.id/Details/279325/permen-lh-no-7-tahun-2014>
- Mayasari, Z. M., Fadilah, F., Reflis, R., Utama, S. P., & Ramdhon, M. (2024). Valuasi Ekonomi Nilai Jasa Hutan: Sebuah Literature Review. *INSOLOGI: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 3(1), 109-117.

- Mayasari, V. F., Pribadi, R., & Soenardjo, N. (2021). Valuasi Ekonomi Ekosistem Mangrove di Desa Timbulsloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. *Buletin Oseanografi Marina*, 10(1), 42-50.
- Rahayuningrum, S. T. (2024). *ANALISIS DAMPAK DEFORESTASI MANGROVE TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (STUDI KASUS PROVINSI RIAU)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Sawal, R., & Hariandja, R. (2025, 19 Februari). Auriga: Deforestasi 2024 masih tinggi, apa pemicunya? Mongabay Indonesia. <https://mongabay.co.id/2025/02/19/auriga-deforestasi-2024-masih-tinggi-apa-pemicunya/>
- Sabet, F. B. A. S., & Ari, W. P. (2022). Valuasi ekonomi sumberdaya pesisir dan laut dalam kebijakan penataan ruang wilayah pesisir dan laut. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 6(2), 74-85.